

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN**

**JUDUL**.....i

**LEMBAR PENGESAHAN**.....ii

**UCAPAN TERIMAKASIH**.....iii

**RINGKASAN**.....ix

**SUMMARY** .....vi

**ABSTRACT**.....xix

**DAFTAR ISI**.....xx

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**.....xxv

**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**.....xxx

**DAFTAR TABEL**.....xxxii

**DAFTAR SINGKATAN**.....xxxiv

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....1

1.2 Tujuan Penelitian.....19

1.3 Manfaat Penelitian.....20

1.4 Orisinalitas Penelitian.....21

1.5 Kerangka Teoritik.....27

    1.5.1 Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Hukum.....27

    1.5.2 Wewenang dan Kewenangan dalam Hukum Administrasi.....31

    1.5.3 Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....34

    1.5.4 Konsep Penegakan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi.....38

    1.5.5 Sanksi Pidana dan Administrasi sebagai *Primum* dan *Ultimum Remidium*.....47

1.6. Metode Penelitian.....56

    1.6.1. Tipe Penelitian.....56

    1.6.2. Pendekatan Masalah.....57

    1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....60

    1.6.4. Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....68

    1.6.5. Sistematika Penelitian.....70

**BAB II. RATIO LEGIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA**

2.1. Perkembangan Kedudukan dan Peran Pemerintah Dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia.....	78
2.1.1. Sejarah Pengaturan Hukum Pertambangan Pra Kemerdekaan di Indonesia.....	78
2.1.2. Sejarah Pengaturan Hukum Pertambangan Pasca Kemerdekaan di Indonesia.....	81
2.2. Ketentuan Normatif Terkait Kewenangan Pemerintah Dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.....	90
2.2.1. Asas dan Tujuan Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	97
2.2.2. Penguasaan Mineral dan Batubara .....	99
2.2.3. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara..	101
2.2.4. Wilayah Pertambangan.....	106
2.2.5. Usaha Pertambangan .....	111
2.2.6. Pendapatan Negara dan Daerah .....	112
2.2.7. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat.....	114
2.3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pembatasan Hak Subjek Hukum Oleh Pemerintah Melalui Perumusan Produk Hukum Dalam Undang-Undang Yang Memuat Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi.....	116
2.3.1. Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	117
2.3.2. Limitasi Pembatasan Hak Sipil dan Politik Dalam Perlindungan Subjek Hukum Menurut Undang-Undang.....	122
2.3.3. Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy</i> ) Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Masyarakat.....	129

2.4. Berbagai Teori Pidana Berkaitan dengan Tujuan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	134
2.4.1. Filosofi dan Tujuan Penggunaan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	138
2.4.2. Filosofi dan Tujuan Penggunaan Sanksi Administrasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	157

**BAB III. KARAKTERISTIK SANKSI PIDANA ADMINISTRASI (ADMINISTRATIVE PENAL LAW) TERHADAP PENGATURAN, PENGELOLAAN, DAN PENEGAKKAN HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA**

3.1. Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ) Dalam Dimensi Hukum Pidana & Hukum Administrasi.....	178
3.2. Pemahaman Sanksi Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ) Berdasarkan Prinsip Kepemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) Dalam Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.....	208
3.2.1. Parameter dan Kualifikasi Sanksi Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ) dalam Dimensi Hukum Publik.....	214
3.2.2. Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) dalam Pengaturan Hukum Pertambangan di Indonesia.....	220
3.3. Konsep dan Teori Keadilan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara di Indonesia Dengan Menerapkan Sanksi Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ).....	232
3.4. Penegakan Sanksi Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ) dalam Konteks Izin.....	237
3.4.1. Pemahaman Konsep Perizinan Dalam Hukum Pertambangan di Indonesia.....	239

3.4.2. Tujuan dari Sistem Perizinan Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan.....	243
3.4.3. Analisa Putusan Penegakan Hukum Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ) dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	257

**BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA ADMINISTRASI (*ADMINISTRATIVE PENAL LAW*) DALAM BERBAGAI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA YANG BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN**

4.1. Legitimasi Fungsi dan Kewenangan Organ/Lembaga Pemerintah dalam Penerapan Sanksi Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ).....	268
4.2. Perlindungan Hukum Sebagai Kewajiban dan Tanggungjawab Negara dalam Penerapan Sanksi Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ) Berkaitan Dengan Kerusakan Lingkungan Hidup.....	282
4.2.1. Kewajiban Pemerintah dalam Upaya Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	287
4.2.2. Tanggungjawab Negara dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Gagasan Keadilan Restorasi ( <i>Restorative Justice</i> ).....	299
4.3. Gagasan Hadirnya Pengadilan Khusus Terkait Penegakan Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ) Dalam Berbagai Undang- Undang Di Indonesia Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan..	308
4.3.1. Instrumen Peraturan Perundang-undangan Sebagai Landasan Hadirnya Pengadilan Khusus.....	309
4.3.2. Karakteristik Penegakan Hukum Administrasi Yang Melandasi Proses Penegakan Pidana Administrasi ( <i>Administrative Penal Law</i> ).....	319

4.3.3. Upaya Mewujudkan Pengadilan Khusus Sebagai Antisipasi  
Terjadinya *The Tragedy of Common* Dalam Mewujudkan  
Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).....326

**BAB V. PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....348  
5.2. Saran.....353

**DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

TAP MPR Nomor XI/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4);

TAP MPR Nomor XV Tahun 1998 tentang Penyelegaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

*Burgerlijk Wetboek* (BW) biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, S.1847 No.23;

*Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata S.1848 No.16, S.1941 No.44;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum PIDana (LN No 127 Tahun 1958, TLN No 1660);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN No 104 Tahun 1960, TLN No 2043);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang diundangkan pada tanggal 14 Oktober 1960 (LN No. 119, TLN No.2055);

*Wetboek van Straafrecht* (WVS) biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (LN No. 22 Tahun 1967, TLN No. 2831);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (LN No 76 Tahun 1981, TLN No 4595);

Undang-Undang Nomor Tahun 1986 jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN No. 160 Tahun 2009, TLN No 5079);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN No.49 Tahun 1990; TLN No.3419);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (LN No.77 Tahun 1995, TLN No. 3614);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No 3886);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN No.167 Tahun 1999; TLN No.3888);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara tahun 2001 No. 136, TLN No. 4152);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (LN No.2 Tahun 2002, TLN No. 4168);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (LN No.49 Tahun 2003, TLN No. 4288);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (LN No.67 Tahun 2004, TLN No. 4401);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN No. 104 Tahun 2004, TLN No 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (LN No. 33 Tahun 2007, TLN No 4700);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (LN No. 69 Tahun 2008; TLN No. 4851);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No.157 Tahun 2009 , TLN No. 5076);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (LN No 4 Tahun 2009, TLN No 4959);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (LN No.11 Tahun 2009; TLN No.4966);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN No 140 Tahun 2009, TLN No 5059);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN No.154 Tahun 2004; TLN No.5073);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN No. 183 Tahun 2019, TLN No 6398);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LN No.130 Tahun 2013; TLN No.5432);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LN No. 292 Tahun 2014, TLN No 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (LN No. 9 Tahun 2010);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (LN No 28 Tahun 2010, TLN No 5110);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (LN No 230 Tahun 2016, TLN No 5943);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No 29 Tahun 2010, TLN No 5111);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No 45 Tahun 2012, TLN No 5282);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No 85 Tahun 2010, TLN No 5142);



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (LN No 138 Tahun 2010, TLN No 5172);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No 1 Tahun 2014, TLN No 5489);

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Nomor 668 Tahun 2017);

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Nomor 596 Tahun 2018);

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Alam Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Nomor 295 Tahun 2018);

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-028/A/Ja/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subjek hukum korporasi;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh korporasi;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan No 4 Tahun 1975 tentang Sandera (*Gijzeling*).

## DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2402 K/Pid.Sus/2015 an. Terdakwa Haidir bin Said Alin;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2756 K/Pid.Sus/2015 an. Terdakwa Abd. Rahim Siahaan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 736 K/Pid.Sus/2015 an. Terdakwa Habib;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/Pid.Sus/2015 an. Terdakwa H.Haririadi bin H.Mulyar Samsi;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/Pid.Sus/2015 an. Terdakwa Ir.Muztav Sjab;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1379 K/Pid.Sus/2015 an. Terdakwa Halim;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2900 K/Pid.Sus/2015 an. Terdakwa Achmad Anwar;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 22 huruf e, Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 22 huruf f, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 169 huruf a dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-I/2013 tentang Pengujian Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 Database IUP Mineral dan Batubara.....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 2 Status IUP Nasional.....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 3 Status IUP Provinsi.....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 4 Matrix Tindak Pidana Khusus dan Hukum Pidana Khusus.....</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 5 Matrix UU No. 11 Tahun 1967 &amp; UU No. 4 Tahun 2009.....</b>	<b>88</b>
<b>Tabel 6 Jenis Pidana dan Aturan Pidanaaan.....</b>	<b>135</b>
<b>Tabel 7 Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.....</b>	<b>246</b>
<b>Tabel 8 Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi.....</b>	<b>248</b>
<b>Tabel 9 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.....</b>	<b>248</b>
<b>Tabel 10 Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi.....</b>	<b>250</b>
<b>Tabel 11 Izin Pertambangan Rakyat.....</b>	<b>250</b>
<b>Tabel 12 Putusan Pengadilan terkait PETI .....</b>	<b>256</b>
<b>Tabel 13 Matrix Pidana Administrasi Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup.....</b>	<b>355</b>

**DAFTAR SINGKATAN**

<b>KPI</b>	= <b>Komisi Penyiaran Indonesia</b>
<b>WP</b>	= <b>Wilayah Pertambangan</b>
<b>TLN</b>	= <b>Tambahan Lembaran Negara</b>
<b>LN</b>	= <b>Lembaran Negara</b>
<b>UU PA</b>	= <b>Undang-Undang Pokok Agraria</b>
<b>IUP</b>	= <b>Izin Usaha Pertambangan</b>
<b>IPR</b>	= <b>Izin Pertambangan Rakyat</b>
<b>IUPK</b>	= <b>Izin Usaha Pertambangan Khusus</b>
<b>IISD</b>	= <b>International Institute for Sustainable Development</b>
<b>WIUP</b>	= <b>Wilayah Izin Usaha Pertambangan</b>
<b>WPR</b>	= <b>Wilayah Pertambangan Rakyat</b>
<b>PK</b>	= <b>Peninjauan Kembali</b>
<b>WIUPK</b>	= <b>Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus</b>
<b>PETI</b>	= <b>Pertambangan Tanpa Izin</b>
<b>UNEP</b>	= <b>United Nation Environment Programme</b>
<b>UCED</b>	= <b>United Nations Conference on Environment and Development</b>
<b>UNFCCC</b>	= <b>United Nations Framework Convention Climate Change</b>
<b>PSK</b>	= <b>Penambang Skala Kecil</b>
<b>KUHP</b>	= <b>Kitab Undang Undang Hukum Pidana</b>
<b>UUD NRI</b>	= <b>Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia</b>
<b>UU AP</b>	= <b>Undang Undang Administrasi Pemerintah</b>
<b>UNDP</b>	= <b>United Nations Development Programme</b>
<b>HIR</b>	= <b>Herziene Indonesische Reglement</b>
<b>KUHAP</b>	= <b>Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana</b>
<b>PPNS</b>	= <b>Penyidik Pegawai Negri Sipil</b>
<b>KPK</b>	= <b>Komisi Pemberantasan Korupsi</b>
<b>SATPOL PP</b>	= <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
<b>MPR</b>	= <b>Majelis Permusyawaratan Rakyat</b>
<b>TAP MPR</b>	= <b>Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat</b>
<b>BW</b>	= <b>Burgerlijk Wetboek</b>
<b>WVS</b>	= <b>Wetboek Van Straafrecht</b>
<b>ROCCIPI</b>	= <b>Rules Opportunity Capacity Communication Interst Process Ideology</b>
<b>PKKPKKI</b>	= <b>Peraturan Kesempatan Kemampuan Proses Komunikasi Kepentingan Ideologi</b>
<b>RUU</b>	= <b>Rancangan Undang Undang</b>
<b>PDB</b>	= <b>Product Domestic Bruto</b>
<b>WUP</b>	= <b>Wilayah Umum Pertambangan</b>
<b>WPN</b>	= <b>Wilayah Pertambangan Nasional</b>
<b>WPR</b>	= <b>Wilayah Pertambangan Rakyat</b>
<b>IPR</b>	= <b>Izin Pertambangan Rakyat</b>
<b>ESDM</b>	= <b>Energi Sumber Daya Mineral</b>
<b>MK</b>	= <b>Mahkamah Konstitusi</b>
<b>KK</b>	= <b>Kontrak Karya</b>

<b>PKP2B</b>	= Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
<b>KP</b>	= Kuasa Pertambangan
<b>SIPD</b>	= Sistem Informasi Pembangunan Daerah
<b>BUMN</b>	= Badan Usaha Milik Negara
<b>GATT</b>	= General Agreement On Tariff and Trade
<b>WTO</b>	= World Trade Organization
<b>HAM</b>	= Hak Asasi Manusia
<b>KTT</b>	= Konferensi Tingkat Tinggi
<b>DPRD</b>	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>PUU</b>	= Pengujian Undang-Undang
<b>BPHN</b>	= Badan Pembinaan Hukum Nasional
<b>WUPK</b>	= Wilayah Usaha Pertambangan Khusus
<b>BUMD</b>	= Badan Usaha Milik Daerah
<b>NRM</b>	= Normative Rightsmodels
<b>IHRL</b>	= International Human Rights Law
<b>UDHR</b>	= Universal Declaration Of Human Rights
<b>DUHAM</b>	= Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
<b>HPN</b>	= Hak Pengelolaan Negara
<b>AAUPB</b>	= Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
<b>KTUN</b>	= Keputusan Tata Usaha Negara
<b>IMB</b>	= Izin Mendirikan Bangunan
<b>SIM</b>	= Surat Izin Mengemudi
<b>NPWP</b>	= Nomor Pokok Wajib Pajak
<b>KTP</b>	= Kartu Tanda Penduduk
<b>PN</b>	= Pengadilan Negeri
<b>PID</b>	= Pidana
<b>KPPLH</b>	= Komisi Pengawasan Perlindungan Lingkungan Hidup
<b>KPPU</b>	= Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
<b>GBHN</b>	= Garis Besar Haluan Negara
<b>RPJP</b>	= Rencana Pembangunan Jangka Panjang
<b>RPJM</b>	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah
<b>RKP</b>	= Rencana Kerja Pemerintah
<b>RKPD</b>	= Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
<b>IPTEK</b>	= Ilmu Perkembangan Teknologi
<b>UNCLOS</b>	= United Nation Convention for Law of The Sea
<b>IPM</b>	= Indeks Pembangunan Manusia
<b>IPG</b>	= Indeks Pembangunan Gender
<b>TNI</b>	= Tentara Negara Indoneisa
<b>PBB</b>	= Persatuan Bangsa Bangsa
<b>SKPD</b>	= Satuan Kerja Pemerintah Daerah
<b>KLHK</b>	= Kemetrian Lingkungan Hidup
<b>TUN</b>	= Tata Usaha Negara
<b>UU PPLH</b>	= Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
<b>Hidup</b>	
<b>KID</b>	= Komisi Informasi Daerah

**DKPP** = Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum  
**KPPU** = Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
**BAWASLU** = Badan Pengawas Pemilu  
**TIPIKOR** = Tindak Pidana Korupsi  
**KIP** = Komisi Informasi Pusat  
**ORI** = Ombudsman Republik Indonesia